



PEMERINTAH KOTA BATAM

RANCANGAN PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)
KOTA BATAM TAHUN 2024**



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ~~172~~ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1512

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan kondisi berjalan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 yang pelaksanaannya sudah berorientasi hasil dan implementasi seluruh program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam tetap berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam telah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil namun dalam rangkap penyesuaian pencapaian target kinerja terhadap kondisi berjalan perlu diadakan perubahan Rencana Kerja agar target yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024.

Semoga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 bermanfaat bagi pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam.

Batam, 25 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Batam



Novi Harmadyastuti, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....	i
------------------------	----------

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 S.D TRIWULAN II 10

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 s.d Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	88

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 89

3.1. Program dan Kegiatan Tahun 2024	96
--	----

BAB IV. PENUTUP..... 120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada RPJMD.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sebagai perwujudan dari semangat Otonomi Daerah, serta mengacu kepada UUD 1945 pasal 27 tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga Negara tidak ada kecualinya, Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional, kemudian adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (PTPPO), Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga dimana dari latar belakang undang-undang sebagaimana disebutkan diatas bahwa diamanatkan disetiap daerah diwajibkan untuk melaksanakan amanat tersebut sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan, oleh karena Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagai lembaga organisasi pemerintahan sangat diperlukan, dan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam telah diberikan mandat dan wewenang untuk membuat program kebijakan dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Batam.

Selain beberapa hal yang telah diuraikan diatas maka latar belakang dibuatnya renja adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan dan bernegara secara terus menerus yang berkesinambungan, dan dalam melaksanakan otonomi daerah perlu dilaksanakan beberapa hal; **pertama** memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender melalui kebijakan nasional secara optimal dan memadai sesuai tuntutan umum dari masyarakat agar aparat pemerintah memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. **Kedua** pelayanan prima harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum terutama untuk meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan serta Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat.

Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sejahtera, maka kedudukan peran perempuan perlu mendapat perhatian, ditingkatkan terus dan dikedepankan terutama di tingkat Kabupaten/Kota karena perempuan merupakan salah satu unsur komponen dari bagian masyarakat yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan, Rendahnya pendidikan yang dimiliki kaum perempuan di bidang kesehatan dan kesehatan reproduksi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pemerintahan maupun legislatif hal ini selanjutnya akan berdampak kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang Kota Batam ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;

- 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana
- 6) Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
- 7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 9) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak ;
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
 - 14) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2003 tentang Pengalihan sebagian Tugas Dinas Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ke Pemerintah Daerah (Kabupaten / Kota)
 - 15) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan Nasional
 - 16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Di Daerah Batam
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - 18) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024
 - 19) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 20) Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
 - 21) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- 22) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 23) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batam
- 24) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
- 25) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- 26) Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- 27) Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 28) Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah
- 29) Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022
- 30) Perwako Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023

- 31) Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
- 32) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026
- 33) Perwako Perubahan RKPD 2023 Nomor 82 Tahun 2023 Berita Daerah Nomor 11209

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini adalah :

- a. Sinkronisasi antara RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Renja dengan mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
- b. Tersedianya sebuah dokumen perencanaan yang memuat program kerja yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
- c. Untuk memudahkan dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur dan pedoman kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun dokumen perencanaan.
- e. Untuk mensinergikan antara kebijakan dan program yang ada didalam Renstra dengan renja yang disusun setiap tahunnya, dan sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisikan Latar belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum juga bagaimana Sistematika Penulisan Renja ini.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada bab II ini diuraikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Triwulan II Tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab III ini berisikan tentang rincian program dan kegiatan (perubahan)

BAB IV. PENUTUP

Lampiran

*SK Tim RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk Tahun 2023*

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 s.d TRIWULAN II 2024

Sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Instansi. Tolok ukur keberhasilan kinerja tersebut mengacu pada ketercapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam
- b. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
- c. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
- d. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga

Keempat sasaran yang ingin dicapai tersebut pada Tahun 2023 mempedomani Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas keputusan Mendagri Nomor: 050.5883 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dituangkan melalui 10 program, 20 Kegiatan dan 42 sub kegiatan mendasar yang secara umum pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan berorientasi pada ketercapaian sasaran dimaksud. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Rencana Kinerja dan sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas Kinerja digambarkan capaian-capaian kinerja pada tahun 2023 yang berkorelasi dengan RPJMD 2021-2026 dan proyeksi pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 mempedomani Renstra Tahun 2021-2026. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023 dari Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 dan capaian kegiatan berjalan sampai dengan periode Triwulan II yang diperoleh dalam analisa pelayanan perangkat daerah tahun 2024 menyesuaikan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3APPKB Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA

DP3APPKB

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana s/d Tahun 2024 Kota Batam**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Mayoritas kegiatan DP3AP2KB yang bersentuhan dengan masyarakat terkait pelayanan telah terlaksana sesuai yang diharapkan. Sebagai berikut gambaran pelaksanaan pada masing-masing program, kegiatan dan Sub kegiatan pada tahun 2023.

2.2.1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Melalui Program Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupaya mewujudkan kualitas hidup, dan potensi perempuan untuk mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat kota Batam. Dalam capaian program ini diwujudkan langkah-langkah progresif untuk memacu peran aktif perempuan terlibat langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan perempuan untuk melangsungkan kehidupan yang berkesinambungan baik dari segi ekonomi, edukasi, budaya dan sosial yang mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga secara umumnya.

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan melalui 77 Tim Penggerak PKK yang dibentuk dalam upaya pencapaian Keluarga harmonis dan sejahtera. Sepanjang Tahun 2023 kegiatan ini telah terlaksana dengan baik. Pembinaan akhlak mulia bagi kader dan pengurus PKK sebanyak 5100 orang di 12 Kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan moril dan spiritual perempuan dalam keluarga. Kegiatan ini dipandang perlu untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan sesama dalam upaya mencapai keselarasan hidup bermasyarakat dalam keberagaman. Demikian halnya melalui kegiatan ini juga telah terlaksana HKG PKK, Halal Bi Halal dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan melalui Pelatihan Kuliner, Pelatihan Tata Rias yang melibatkan 21.062 orang perempuan Kota Batam yang memberikan semangat dan motivasi dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga sehingga mampu berkontribusi dan berperan aktif dalam membangun ekonomi kota Batam. Pelatihan ini mencakup Pelatihan Tataboga/Kuliner bagi 3517 orang, pelatihan tata rias bagi 630 orang dan pelatihan Publik Speaking bagi 1065 orang perempuan Kota Batam. Dengan metode ini perempuan Kota Batam khususnya ibu rumah tangga ekonomi lemah dapat memiliki daya cipta dan menghasilkan produk yang bernilai jual di pasaran sehingga meningkatkan taraf hidup keluarga yang berperan dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan Kota Batam. Capaian Realisasi Keuangan kegiatan ini 97.23% dengan pencapaian fisik kegiatan sebesar 100%.

2.2.2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Melalui program ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupaya mewujudkan kualitas hidup perempuan yang berhaluan pada kesetaraan gender dan peningkatan akses publik bagi kaum perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Perempuan diberikan pembekalan dalam upaya peningkatan kompetensi dan wawasan pembangunan yang turut andil setara dengan kaum laki-laki. Sasaran kegiatan ini pada akhirnya mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Kota Batam yang pada tahun 2023 di proyeksikan pada angka IPG 94.46 dan IDG 58.50 dan pencapaian IPG Kota Batam pada tahun 2023 sebesar 94.75 sedangkan IDG Kota Batam sebesar 58.65. Program ini dituangkan dalam 2 kegiatan yaitu:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota

Melalui Kegiatan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam mengupayakan penerapan kesetaraan gender di Kota Batam. Tujuan kegiatan ini agar setiap kegiatan/program OPD memuat atau merumuskan

cakupan-cakupan keselarasan gender dalam kegiatan yang dilaksanakan masing-masing OPD. Melalui kegiatan ini terlaksana pelatihan PPRG(GAB/GBS) bagi perencana se-kota Batam. Dan capaian Anggaran Responsif Gender tercapai pada angka 10.40% dari total belanja langsung APBD kota Batam (sebesar Rp. 342.810.964.575,- dari total belanja langsung Rp. 3.298.348.071.263) Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar 91.51% dan capaian fisik sebesar 100%.

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan

a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Melalui kegiatan ini telah terlaksana pelatihan Tata Rias bagi 630 orang Ibu rumah tangga yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi dan keterampilan kaum perempuan yang mendukung peningkatan ekonomi keluarga sejahtera. Demikian halnya terlaksana Talkshow kesehatan bagi 220 orang perempuan bersamaan dengan peringatan Hari Kartini dengan tujuan untuk meningkatkan semangat perjuangan kaum perempuan dalam menggali potensi dan sumberdaya di berbagai bidang pembangunan berbangsa dan bermasyarakat. Capaian fisik kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 98.18%.

2.2.3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini dilaksanakan dalam upaya penyediaan basis data gender dan anak yang mengakomodir pelaksanaan Anggaran Responsif Gender GAB/GBS dalam pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Batam. Dan dilaksanakan melalui kegiatan

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pada tahun 2023 Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan anggaran yang terealisasi sebesar 97.96 % dan capaian fisik kegiatan sebesar 100%. Muatan kegiatan ini mengakomodir Pelatihan dan Penginputan Data PPRG OPD dalam Penggunaan Aplikasi E-SIPUGA. Pelatihan dan Penginputan Data PPRG Kecamatan dalam Penggunaan Aplikasi E-SIPUGA yang diharapkan memberikan pemahaman perangkat daerah dalam merencanakan penganggaran yang berporos pengarusutamaan gender.

2.2.4. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Mengingat tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak, maka dipandang sangat perlu untuk memberikan pemahaman tentang Perda perlindungan Perempuan dan Anak ini kepada masyarakat luas. Sering sekali perempuan dan anak menjadi target dan korban kekerasan yang tak jarang meninggalkan trauma fisik dan psikologis jangka panjang yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas generasi bangsa yang produktif. Maka melalui kegiatan ini Dinas pemberdayaan Perempuan berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat baik melalui sosialisasi dan penyuluhan agar hak-hak anak dan perempuan dapat diperoleh sebagaimana mestinya. Dalam Pelaksanaan Kegiatan ini juga melibatkan tim P2TP2A dan Tim KPPAD yang sudah terbentuk dan berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Secara garis besar kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dalam pencegahan dan penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Sampai dengan akhir 2023 terdapat 43 total kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah ditangani dengan baik. Realisasi kegiatan ini telah mengakomodir pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Anak Kota Batam (3x), Pembekalan Satgas Kelurahan Bebas Kekerasan dan Rapat Koordinasi Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Capaian realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 90.80 dan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 66.40% dan capaian fisik sebesar 90%

2.2.5. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak Tahun 2023 diakomodir dari belanja Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) yang secara umum pelaksanaannya sesuai dengan juknis dari kementerian.

Program ini dituangkan dalam 1 kegiatan utama di bawah ini:

- a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Sampai dengan akhir tahun 2023 kekerasan terhadap anak mencapai 132 kasus. Ini adalah angka yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam. Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan layanan khusus dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan pada anak. Alokasi anggaran kegiatan ini terealisasi sebesar 75.46% dengan realisasi fisik sebesar 90%. Sejumlah persoalan tidak terserapnya anggaran secara maksimal karena penanganan kasus kekerasan tidak sampai

kepada proses medis maupun penanganan medicolegal yang dimuat dalam kerangka anggaran belanja kegiatan ini.

2.2.6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menjamin keberlangsungan hak-hak anak dalam proses tumbuh kembang baik di bidang pendidikan, sosial dan budaya. Melalui Kegiatan ini tahun 2023 telah terbentuk Forum Anak di 12 Kecamatan se-Kota Batam dan 41 Kelurahan dan Demikian halnya KPPAD Kota Batam sebagai komisi pengawas yang menjadi salah satu substansi kegiatan ini turut berperan aktif dalam mengkampanyekan hak-hak anak dan program-peningkatan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak di Kota Batam. Kegiatan ini juga mengakomodir Honorarium KPPAD Kota Batam dan pelaksanaan Penilaian Kota Layak Anak yang pada tahun 2023 mencapai 950 Skor dan meraih peringkat Nindya. Capaian realisasi fisik dari kegiatan ini sampai mencapai 100% dengan alokasi anggaran sebesar 97.64%.

2.2.7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam mencetuskan Program Pembinaan Keluarga Berencana sebagai salah satu program

yang terus akan diwujudkan sesuai dengan yang termaktub dalam RPJMD. Dalam capaian program ini diwujudkan langkah-langkah progresif untuk menekan angka kelahiran penduduk, melaksanakan penyuluhan Keluarga Berencana, dan memberikan pemikiran cerdas terhadap generasi muda Kota Batam tentang bahaya seks bebas, PMS dan HIV/AIDS dan penggunaan obat-obat terlarang (narkoba). Sebagian besar kegiatan dalam program ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat. Program ini dituangkan dalam beberapa kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Realisasi Keuangan 91.68 % dan capaian fisik 100 % melalui pelaksanaan Pelayanan KB Gratis dan penyuluhan KB di kecamatan dan kelurahan Kota Batam.

Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan program KB dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera sebagai pilar utama pembangunan kota Batam. Capaian CPR Kota Batam pada tahun 2023 sebesar 82.63 %

b. Pengendalian Program KKBPK

Kegiatan ini mengakomodir media informasi program pembangunan keluarga dan informasi Keluarga Berencana bagi kader KB dan PIK-Remaja Kota Batam. Realiasi Keuangan sebesar 98.90% dan realisasi fisik sebesar 100%.

c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Kegiatan ini mengakomodir Pembayaran Air, Listrik dan Internet untuk Balai Penyuluhan di 12 kecamatan (bulan januari s.d Mei), penyuluhan bagi kader berbasis data kependudukan pada 12 kecamatan. Realiasi Keuangan sebesar 84.15% dan realisasi fisik sebesar 90%

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan ini mengakomodir Pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD pada 12 kecamatan. Dan realisasi keuangan sampai akhir tahun 2023 sebesar 100 % dengan capaian fisik sebesar 100 %.

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

a. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Melalui kegiatan ini Dinas

Pemberdayaan Perempuan telah mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke 317 Fasilitas kesehatan KB se-Kota Batam yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah akseptor Aktif KB pada tahun 2023. Realisasi Keuangan sebesar 93.97% dan fisik 100%.

b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Realisasi Keuangan sebesar 43.87 % dan fisik sebesar 85 %

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program keluarga berencana dan pembangunan kependudukan baik melalui lokakarya mini maupun penyuluhan program keluarga berencana.

Penggerakan Kampung KB ini merupakan pemetaan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi yang perlu dijadikan prioritas program layanan KB yang didukung oleh kader Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB 76 orang), Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD /sub PPKBD 128 orang) sebagai ujung tombak penggerak program KB di kecamatan dan kelurahan.

Realisasi keuangan 89.81 % dan fisik sebesar 95%

2.2.8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS).

Muatan kegiatan ini berupa pengadaan KIT Siap Nikah Stunting sebanyak 35 Unit dan BKB KIT Stunting sebanyak 25 unit yang diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok Bina Keluarga Balita di Posyandu dan sekolah-sekolah yang memiliki jalur PIK-R (Pusat informasi Konseling Remaja) se-kota Batam dalam upaya mensukseskan program pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga sejahtera (i bangga). Serapan anggaran kegiatan ini sebesar 65.28% dengan Realisasi fisik kegiatan sebesar 90%

- b. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Realisasi Keuangan 94.43% dan fisik 100 %

Dalam upaya peningkatan taraf hidup keluarga, sampai dengan Tahun 2023 telah terbentuk sebanyak 430 kelompok kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga yang menyasar ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan khusus(baik dalam menjahit, memasak, tata rias dan lainnya) yang dapat dikembangkan dan menghasilkan produk-produk yang bernilai

jual di kalangan masyarakat kota Batam. Melalui kegiatan ini juga terbentuk kelompok tribina sebagai salah satu indikator pencapaian keluarga sejahtera. Sampai dengan tahun 2023 BKB HI terbentuk 179 kelompok, BKL terbentuk 27 kelompok, dan BKR terbentuk 39 kelompok. Untuk membuka wawasan dan pengetahuan remaja di Kota Batam juga dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada remaja. Kondisi remaja pada masa kini telah memasuki tahap yang memperihatinkan. Terbukanya secara luas sistem jaringan internet telah banyak mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja dewasa ini. Remaja cenderung pasif dan kurang kreatif bahkan kerap kali terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengkonsumsi narkoba. Melalui Pembentukan PIK-R di sekolah-sekolah maupun jalur masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam dengan gencar memaparkan program remaja yang berencana untuk meraih masa depan gemilang yang bebas dari narkoba dan sex bebas. Sampai dengan tahun 2023 telah terbentuk PIK-R sebanyak 66 kelompok yang diharapkan menjadi pioner bagi remaja Kota Batam dalam mewujudkan remaja cerdas berencana dan unggul.

2.2.9. Program Pengendalian Penduduk

Program ini memuat kebijakan daerah dalam sistem kependudukan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Batam pada periode 5 tahun RPJMD. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat disusun basis data pembangunan kependudukan yang berhaluan kepada penataan wilayah dan akses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Program ini diakomodir melalui kegiatan:

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 telah disusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang diharapkan dapat menjadi haluan perencanaan pembangunan yang berbasis kependudukan. Realisasi keuangan sebesar 94.60% dan realisasi fisik 100%.

2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB. Realisasi Keuangan sebesar 95.46%, dan capaian fisik sebesar 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3APPKB Kota Batam

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1 (TR W II)	Tahun n	Tahun n+1	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			94.46 %	94.48 %	94.50 %	94.52 %	94.75 %	49.55 %	94.50 %	94.52 %	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			58.50%	58.55%	58.60 %	58.65 %	58.65 %	43.40 %	58.60 %	58.65 %	
3	Persentase Penurunan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak			6.0%	6.5%	7.0%	7.5%	Meningkat 23%	4.05%	7.0%	7.5%	
4	Angka Kelahiran Total (TFR)			2.34%	2.32%	2.30 %	2.28%	2.16%	0.96%	2.30 %	2.28 %	
5	Indeks Pembangunan Keluarga			57.26%	57.28%	57.30 %	57.32 %	59.76 %	25.51 %	57.30 %	57.32 %	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas hidup perempuan implikasi dari rendahnya kapasitas SDM perempuan kota Batam
2. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam pembangunan sesuai dengan capaian IDG dalam hal keterwakilan perempuan dalam lembag legislative yang masih belum memenuhi kuota 30 %
3. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Tingginya minat pencari kerja yang masuk ke Kota Batam meningkatkan jumlah pasangan usia produktif yang rentan terhadap penambahan angka kelahiran penduduk;
5. Luasnya keterbukaan akses informasi dan teknologi yang dilatarbelakangi oleh letak geografis kota Batam sebagai wilayah border /perbatasan rentan terhadap peningkatan kenakalan remaja yang berdampak kepada perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan pernikahan usia dini;
6. Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dalam upaya menurunkan angka Keluarga Pra Sejahtera I dan Pra Sejahtera II
7. Terbatasnya jumlah penyuluh KB/petugas lapangan KB sebagai koordinator pelaksanaan program bangsa kencana di lapangan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL T-C. 33-3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (2024 Tahun Rencana)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (2025 Tahun Rencana)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)			(3)	(5)	(10)		(8)	(9)	(10)	(11)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					30,293,282,080				22,688,471,387
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					20,571,324,432	PAD			15,238,809,891

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi a Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	10,874,489,532	PAD		100%	11,684,977,372
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	9,152,847,922	PAD		100%	10,592,778,622
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	44 Orang	9,098,597,922	PAD		62 Orang/bulan	10,592,778,622.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	54,250,000	PAD			-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	690,572,250	PAD		100%	283,449,550

			yang terpenuhi							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	7,994,000	PAD		2 Paket	6,996,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	25,000,750	PAD		3 Paket	47,742,050.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	6,730,000	PAD		1 Paket	5,838,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	17,438,000	PAD		3 Paket	18,036,000.00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	15,944,000	PAD		1 Paket	12,071,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	617,465,500	PAD		12 Laporan	192,766,500.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%	167,190,000	PAD		100%	393,938,000.00
–	Pengadaan Mebel	–	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	–	–	PAD		60 Unit	174,338,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	5 Unit	167,190,000	PAD		18 Unit	219,600,000

			yang Disediakan							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100%	686,889,360	PAD		100%	237,516,200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	112,726,800	PAD		12 Laporan	117,299,400.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	574,162,560	PAD		12 Laporan	120,216,800.00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%	176,990,000	PAD		100%	177,295,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	2 Unit	79,060,000	PAD		2 Unit	79,030,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Kota Batam	5 Unit	75,350,000	PAD		7 Unit	80,805,000.00

			Perizinannya							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	60 Unit	22,580,000	PAD		26 Unit	17,460,000.00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil		11,40 / 70%	5,756,634,000	PAD		11,50 / 75%	617,000,000
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	Persentase OPD yang dibina dan berhasil		75%	86,000,000	PAD		80%	152,000,000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	35 Dokumen	86,000,000	PAD		35 Dokumen	152,000,000.00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina	Persentase perempuan yang dibina		75%	5,670,634,000	PAD		80%	465,000,000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Kota Batam	2 Dokumen	5,670,634,000	PAD		12 Dokumen	465,000,000.00

		Kewenangan Kabupaten/Kota	Ekonomi Kewenang an Kabupaten/ Kota							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaika n	Persentas e Pengadua n Kasus Kekerasan Perempua n yang terselesaik an		100%	471,054,000	PAD		100%	220,000,000
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanj uti	Persentas e Pengadua n yang ditindakla njuti		40%	320,000,000	PAD		40%	220,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegaha	Kota Batam	57 Dokumen	320,000,000	PAD		12 Dokume n	220,000,000.00

		Kewenangan Kabupaten/Kota	n Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenang an Kabupaten/ Kota							
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	UPTD	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanj uti /dirujuk			30%	151,054,000				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	UPTD	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			17 Layanan	151,054,000				

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Persentas e Kapasitas SDM perempua n di Kota Batam		4.75	2,880,520,000	PAD		5	2,046,312,519
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	Persentas e kader PKK dan perempua n yang dibina dan aktif		75%	2,880,520,000	PAD		80%	2,046,312,519.0 0
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembang an Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah Laporan Pengemba ngan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkata n Kualitas Keluarga Kewenang an Kabupaten/ Kota	Kota Batam	2 Laporan	2,880,520,000	PAD		12 Laporan	2,046,312,519
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatk an Data gender dan Anak dalam pelaksanaan	Persentas e OPD yang sudah memanfaa tkan Data gender dan Anak		75%	67,239,000	PAD		80%	190,000,000

		Kebijakan PUG	dalam pelaksanaan Kebijakan PUG							
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap		75%	67,239,000	PAD		80%	190,000,000.00
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	44 Dokumen	67,239,000	PAD		12 Dokumen	190,000,000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak		800	374,999,900	PAD		820	310,000,000

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA		68%	374,999,900	PAD		70%	310,000,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	5 Dokumen	374,999,900	PAD		5 Dokumen	310,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	–	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan		–	–			100%	170,520,000
N.A	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	–	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti		–	–			75%	101,500,000.00

N.A	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	–	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Batam	–	–			40 orang	101,500,000
N.A	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	–	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk		–	–			30%	69,020,000
N.A	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	–	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kota Batam	–	–			40 Orang	69,020,000

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti			100%	146,388,000				
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KEG PINDAH KE UPTD	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti			65%	146,388,000.00				
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		Kota Batam	55 layanan	146,388,000	DAK BOPPA			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9,721,957,648				7,142,181,496
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK		50%	315,800,000			60%	358,200,000

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan		50%	50,000,000			60%	45,000,000
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	50,000,000	PAD		1 Dokumen	45,000,000.00
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber		100%/ 40%	265,800,000			100%/ 50%	313,200,000

			KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi							
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	Kota Batam	12 Laporan	64,200,000	DAK BOKB		12 Laporan	60,000,000
Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Batam	1 Laporan	129,600,000	DAK BOKB		12 Laporan	253,200,000.00
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	–	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			12 Dokumen	72,000,000	DAK BOKB			–

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need		82.00 / 9	5,483,957,648			83.0 /8.50	4,336,651,600
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi		100% / 45%	1,086,634,648			100% / 50%	1,389,203,600.00
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan	Kota Batam	96 Organisasi	80,000,000	DAK BOKB		96 Organisasi	100,000,000.00

		an, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kota Batam	4 Dokumen	302,034,648	PAD		4 Dokumen	190,003,600
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Kota Batam	1 Dokumen	150,000,000	DAK BOKB		4 Dokumen	100,000,000

		an Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Batam	1 Laporan	156,000,000	DAK BOKB		4 Laporan	180,000,000

			Lokakarya (Minilok)							
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	1 Laporan	318,600,000	DAK BOKB		12 Laporan	739,200,000.00
Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kota Batam	1 Laporan	80,000,000	DAK BOKB		4 Laporan	80,000,000

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase tenaga lini/kader yang aktif		70%	240,000,000			70%	192,000,000.00
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	5 Organisasi	112,000,000	DAK BOKB		552 Orang	192,000,000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/P		Kota Batam	542 Orang	128,000,000	DAK BOKB			-

		enyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
-	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaa n Penyuluha n, Penggerak an, Pelayanan dan Pengemba ngan Program Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Kota Batam	5 Laporan	0			5 Laporan	1,051,974,000.0 0

			(PKB/PLKB)							
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Presentas e Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB		83%	3,946,823,000			84%	2,596,798,000.00
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke	Kota Batam	12 Laporan	140,400,000	DAK BOKB		12 Laporan	161,100,000

			Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	600 Orang	2,779,703,000	DAK BOKB		625 Orang	1,383,724,000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	–	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		Kota Batam	20 Unit	957,420,000				–
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	–	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk		Kota Batam	1 Laporan	69,300,000				–

		Jaringan dan Jejaringnya								
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Presentas e kampung KB yang aktif		70%	210,500,000			70%	158,650,000.00
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaa n Program Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan	Kota Batam	13 Kampung KB	210,500,000			13 Kampun g	158,650,000.00

			Keluarga Berencana)							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif		55%	3,922,200,000			60%	2,447,329,896.00
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina		100%	3,922,200,000			100%	2,447,329,896.00
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Kota Batam	20 Unit	360,000,000	DAK BOKB		20 Unit	120,000,000.00

		Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia							
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kota Batam	12 Laporan	135,000,000	PAD		12 Laporan	94,259,969

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kota Batam	350 Orang	3,427,200,000	DAK BOKB	450 Orang	2,233,069,927.00
-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								307,480,000.00

-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentas e Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerinta han						100%	72,000,000
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentas e Administra si Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		-	-	PAD		100%	12,000,000.00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Kota Batam	-	-	PAD		4 Paket	10,000,000.00
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	-	-	PAD		2 Paket	2,000,000
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentas e Pemelihar aan Barang Milik Daerah		-	-	PAD		100%	60,000,000.00

			Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah yang terlaksana							
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	-	-	PAD		1 Unit	60,000,000.00
-	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan		-	-			100%	77,565,000
-	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti/dirujuk		-	-			30%	77,565,000.00

-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	-	-	DAK BOPPA	17 Layanan	77,565,000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan		-	-		100%	157,915,000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti		-	-		100%	157,915,000

	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kota Batam	-	-	DAK BOPPA		52 Orang	157,915,000
--	-------------------------------------	--	--------------------------------------	------------	---	---	-----------	--	----------	-------------

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			P-RKPD 2024			RKPD 2024	P-RKPD 2023	RKPD 2024	P-RKPD 2024	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							20,571,324,432	18,075,269,123	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	10,874,489,532	10,935,223,223	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	9,152,847,922	10,127,609,873	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	44 Orang	9,098,597,922	10,127,609,873	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	54,250,000	0.00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	690,572,250	153,367,750	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	7,994,000	6,996,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25,000,750	21,501,750	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6,730,000	4,944,000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik	4 Paket	4 Paket	17,438,000	8,151,000	

				Kantor yang Disediakan	Kantor yang Disediakan					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15,944,000	7,183,000	
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	617,465,500	104,592,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	167,190,000	48,783,000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	167,190,000	48,783,000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	686,889,360	419,032,600	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	112,726,800	42,834,600	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	574,162,560	376,198,000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	176,990,000	186,430,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	79,060,000	86,580,000	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	75,350,000	83,530,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	22,580,000	16,320,000	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	11,40 / 70%	11,40 / 70%	5,756,634,000	2,292,036,900	
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	75%	75%	86,000,000	34,859,900	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	35 Dokumen	86,000,000	34,859,900	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina	Persentase perempuan yang dibina	75%	75%	5,670,634,000	2,257,177,000	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	5,670,634,000	2,257,177,000	

		PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	100%	471,054,000	572,249,000	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Ko ta	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	40%	40%	320,000,000	494,684,000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Dokumen	57 Dokumen	320,000,000	494,684,000	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	30%	30%	151,054,000	77,565,000	

		Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan	17 Layanan	151,054,000	77,565,000	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	4.75	4.75	2,880,520,000	3,226,402,000	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	75%	75%	2,880,520,000	3,226,402,000	

		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota							
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2,880,520,000	3,226,402,000	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	75%	75%	67,239,000	43,958,000	
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	75%	75%	67,239,000	43,958,000	

		Daerah Kabupaten/Ko ta	Daerah Kabupaten/Ko ta							
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	67,239,000	43,958,000	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	800	800	374,999,900	623,145,000	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	68%	68%	374,999,900	623,145,000	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	374,999,900	623,145,000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	100%	146,388,000.00	382,255,000	
		N.A	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	N.A	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	N.A	65%	0.00	101,500,000	Pemetaan Nomenklatur Kegiatan
		N.A	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	N.A	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	N.A	40 SDM	0.00	101,500,000	

		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti		65%	146,388,000.00	211,735,000	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		55 Layanan	146,388,000.00	53,820,000	
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		55 Layanan	146,388,000	157,915,000	
2		N.A	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	N.A	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	N.A	30%	0.00	69,020,000	Pemetaan Nomenklatur Kegiatan

			Daerah Kabupaten/Ko ta							
		N.A	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	N.A	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	N.A	40 SDM	0.00	69,020,000	
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9,721,957,648. 00	8,565,753,499	
		PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	50%	50%	315,800,000.00	333,900,000	

		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	50%	50%	50,000,000	20,700,000	
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	20,700,000	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang	100%/40%	100%/40%	265,800,000.00	313,200,000	

				mendapatkan sosialisasi	mendapatkan sosialisasi					
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	64,200,000.00	60,000,000	
		Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	129,600,000.00	253,200,000	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	N.A	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	N.A	12 Dokumen	0	72,000,000.00	0.00	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 / 9	82.00 / 9	5,483,957,648	4,637,533,499	

		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	100% / 45%	100% / 45%	1,086,634,648.00	1,389,203,600	
		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stake Holder dan Mitra kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stake Holder dan Mitra kerja	96 Organisasi	96 Organisasi	80,000,000.00	100,000,000	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	4 Dokumen	4 Dokumen	302,034,648.00	190,003,600	

				Kependudukan , dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kependudukan , dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal					
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000.00	100,000,000	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	1 Laporan	1 Laporan	156,000,000.00	180,000,000	

				Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini Lokakarya (Minilok)	Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini Lokakarya (Minilok)					
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	318,600,000	739,200,000	
		Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	80,000,000.00	80,000,000	
		Pendayaguna an Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayaguna an Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	70%	70%	240,000,000.00	1,544,855,899	

		Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5 Organisasi	5 Organisasi	112,000,000.00	192,000,000.00	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	N.A	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	N.A	542 Orang	0	128,000,000.00	0.00	

		N.A	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	N.A	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	N.A	5 Laporan	0	1,352,855,899	Pemetaan Nomenklatur Kegiatan
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB		83%	3,946,823,000.00	1,544,824,000	

		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		12 Laporan	140,400,000	161,100,000	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		600 Orang	2,779,703,000	1,383,724,000	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	N.A	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	N.A	20 UNIT	0	957,420,000	0	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	N.A	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	N.A	1 Laporan	0	69,300,000	0	

				Jaringan dan Jejaringnya						
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase kampung KB yang aktif	Presentase kampung KB yang aktif	70%	70%	210,500,000	158,650,000	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan	13 Kampung KB	13 Kampung KB	210,500,000	158,650,000	

				, dan Keluarga Berencana)	, dan Keluarga Berencana)					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	55%	3,922,200,000.00	3,594,320,000	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	100%	3,922,200,000.00	3,594,320,000	

			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	360,000,000	120,000,000	
--	--	--	--	--	--	--	---------	-------------	-------------	--

			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	12 Laporan	135,000,000	47,120,000	
--	--	--	--	--	---	---	------------	-------------	------------	--

			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	350 Orang	3,427,200,000	3,427,200,000	
TOTAL PAGU								30,293,282,080.00	26,641,022,622.00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TABEL T-C. 32

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Batam**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	cat
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diwujudkan melalui 10 (Sepuluh) program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Pengendalian Penduduk

Namun demikian, dari sepuluh program tersebut terdapat 1 (satu) program yang merupakan program rutin Setiap OPD, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sehingga yang menjadi program inti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ada 9 (Sembilan) yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4. Program Perlindungan Perempuan
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9. Program Pengendalian Penduduk

Program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan dalam bentuk beberapa kegiatan, yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, yang dilaksanakan dalam satu kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan satu sub kegiatan, yaitu:
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang dilaksanakan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

- B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA

- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
- Pengendalian Program KKBPK
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- C. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- D. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- 8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

9. Program Pengendalian Penduduk

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu program yang mendukung isu strategis pembangunan kota Batam periode 2021-2026 terkait penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan yang memegang peran penting dalam upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam meningkatkan perekonomian dan kapasitas SDM perempuan kota Batam.

Demikian halnya melalui Program Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berupaya memperbaiki taraf hidup keluarga yang masih rendah dan memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat, Meningkatkan kualitas dan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas ketahanan keluarga dan Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta KB, Meningkatkan akses, kualitas pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi yang merata, Meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, Meningkatkan kampanye pendewasaan usia perkawinan, menyediakan data primer tahapan keluarga di Kota Batam.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 :

Tabel 5.02.01
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (APBD 2023)	APBD 2024			P-RKPD 2024			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU APBD 2024	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU P-RKPD 2024	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				21,417,353,022			18,075,269,123	

2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	11,712,814,122		100%	10,935,223,223	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	10,753,519,772		100%	10,127,609,873	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	44 Orang	10,753,519,772	Kota Batam	44 Orang	10,127,609,873	Penyesuaian Jumlah Pegawai Mutasi, Pensiun
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokumen	0.00	Kota Batam	12 Dokumen	0.00	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	198,946,550	Kota Batam	100%	153,367,750	

2.08.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	6,996,000	Kota Batam	3 Paket	6,996,000	
2.08.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	19,283,050	Kota Batam	4 Paket	21,501,750	Menyesu aikan kebutuh an keg.berja lan
2.08.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	4,944,000	Kota Batam	1 Paket	4,944,000	
2.08.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	12,986,000	Kota Batam	4 Paket	8,151,000	Menyesu aikan kebutuh an keg.berja lan
2.08.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	11,971,000	Kota Batam	2 Paket	7,183,000	Menyesu aikan kebutuh an keg.berja lan
2.08.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	142,766,500	Kota Batam	12 Lapora n	104,592,000	Menyesu aikan kebutuh an keg.berja lan

2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	68,095,000	Kota Batam	100%	48,783,000	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	5 Unit	68,095,000	Kota Batam	5 Unit	48,783,000	Menyesuaikan kebutuhan keg.berjalan
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kota Batam	100%	519,482,800	Kota Batam	100%	419,032,600	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	37,827,600	Kota Batam	12 Laporan	42,834,600	Menyesuaikan kebutuhan keg.berjalan
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	481,655,200	Kota Batam	12 Laporan	376,198,000	Menyesuaikan kebutuhan keg.berjalan

2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	172,770,000	Kota Batam	100%	186,430,000	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	2 Unit	79,060,000	Kota Batam	2 Unit	86,580,000	Menyesuaikan kebutuhan keg.berjalan
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	5 Unit	76,250,000	Kota Batam	5 Unit	83,530,000	Menyesuaikan kebutuhan keg.berjalan
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	60 Unit	17,460,000	Kota Batam	60 Unit	16,320,000	

2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	Kota Batam	11,40 / 70%	5,353,485,900	Kota Batam	11,40 / 70%	2,292,036,900	Efisiensi Anggaran
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	Kota Batam	75%	34,859,900	Kota Batam	75%	34,859,900	
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	35 Dokumen	34,859,900	Kota Batam	35 Dokumen	34,859,900	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	Persentase perempuan yang dibina	Kota Batam	75%	5,318,626,000	Kota Batam	75%	2,257,177,000	

	Kabupaten/Kota								
2.08.02.2 .02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Dokumen	5,318,626,000	Kota Batam	2 Dokumen	2,257,177,000	Efisiensi Anggaran
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Kota Batam	100%	467,509,000	Kota Batam	100%	572,249,000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Kota Batam	40%	389,944,000	Kota Batam	40%	494,684,000	

2.08.03.2 .01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	57 Dokumen	389,944,000	Kota Batam	57 Dokumen	494,684,000	Peningkatan Layanan Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	Kota Batam	30%	77,565,000	Kota Batam	30%	77,565,000	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kota Batam	17 Layanan	77,565,000	Kota Batam	17 Layanan	77,565,000	

	Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Kota Batam	4.75	2,961,751,000	Kota Batam	4.75	3,226,402,000	
2.08.04. 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	Kota Batam	75%	2,961,751,000	Kota Batam	75%	3,226,402,000	
2.08.04.2 .01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Laporan	2,961,751,000	Kota Batam	2 Lapora n	3,226,402,000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan	Kota Batam	75%	43,958,000	Kota Batam	75%	43,958,000	

	ANAK	Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG							
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	Kota Batam	75%	43,958,000	Kota Batam	75%	43,958,000	
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	44 Dokumen	43,958,000	Kota Batam	44 Dokumen	43,958,000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Kota Batam	800	387,400,000	Kota Batam	800	623,145,000	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	Kota Batam	68%	387,400,000	Kota Batam	68%	623,145,000	

	Kabupaten/Kota								
2.08.06.2 .01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	5 Dokumen	387,400,000	Kota Batam	5 Dokumen	623,145,000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Kota Batam	100%	490,435,000	Kota Batam	100%	382,255,000	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Kota Batam	65%	101,500,000	Kota Batam	65%	101,500,000	
2.08.07.2 .01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan	Kota Batam	40 SDM	101,500,000	Kota Batam	40 SDM	101,500,000	

	pencegahan KTA	pencegahan KTA							
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Kota Batam	65%	319,915,000	Kota Batam	65%	211,735,000	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Kota Batam	55 Layanan	162,000,000	Kota Batam	55 Layanan	53,820,000	Pemetaan Nomeklatur
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kota Batam	55 Layanan	157,915,000	Kota Batam	55 Layanan	157,915,000	

2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	Kota Batam	30%	69,020,000	Kota Batam	30%	69,020,000	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kota Batam	40 SDM	69,020,000	Kota Batam	40 SDM	69,020,000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Kota Batam		8,331,311,569	Kota Batam		8,565,753,499	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	Kota Batam	50%	353,200,000	Kota Batam	50%	333,900,000	

2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	Kota Batam	50%	40,000,000	Kota Batam	50%	20,700,000	
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	40,000,000	Kota Batam	1 Dokumen	20,700,000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	Kota Batam	100%/40%	313,200,000	Kota Batam	100%/40%	313,200,000	

2.14.02.2 .02.0009	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	Kota Batam	12 Laporan	60,000,000	Kota Batam	12 Laporan	60,000,000	
2.14.02.2 .02.0012	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Batam	1 Laporan	253,200,000	Kota Batam	1 Laporan	253,200,000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	Kota Batam	82.00 / 9	4,336,651,600	Kota Batam	82.00 / 9	4,637,533,499	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	Kota Batam	100% / 45%	1,389,203,600	Kota Batam	100% / 45%	1,389,203,600	

2.14.03.2 .01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stake Holder dan Mitra kerja	Kota Batam	96 Organisasi	100,000,000	Kota Batam	96 Organisasi	100,000,000	
2.14.03.2 .01.0012	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	4 Dokumen	190,003,600	Kota Batam	4 Dokumen	190,003,600	

2.14.03.2 .01.0013	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Batam	1 Dokumen	100,000,000	Kota Batam	1 Dokumen	100,000,000	
2.14.03.2 .01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini Lokakarya (Minilok)	Kota Batam	1 Laporan	180,000,000	Kota Batam	1 Laporan	180,000,000	

2.14.03.2 .01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	1 Laporan	739,200,000	Kota Batam	1 Laporan	739,200,000	
2.14.03.2 .01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kota Batam	1 Laporan	80,000,000	Kota Batam	1 Laporan	80,000,000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	Kota Batam	70%	192,000,000	Kota Batam	70%	1,544,855,899	
2.14.03.2 .02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	542 Orang	192,000,000.00	Kota Batam	542 Orang	192,000,000.00	

2.14.03.2 .02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Batam	5 Laporan	0.00	Kota Batam	5 Laporan	1,352,855,899	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB	Kota Batam	83%	2,596,798,000	Kota Batam	83%	1,544,824,000	

2.14.03.2 .03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	12 Laporan	161,100,000	Kota Batam	12 Laporan	161,100,000	
2.14.03.2 .03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	600 Orang	1,383,724,000	Kota Batam	600 Orang	1,383,724,000	
2.14.03.2 .03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	20 Unit	1,051,974,000	Kota Batam	20 Unit	0	

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase kampung KB yang aktif	Kota Batam	70%	158,650,000	Kota Batam	70%	158,650,000	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	13 Kampung KB	158,650,000	Kota Batam	13 Kampung KB	158,650,000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	Kota Batam	55%	3,641,459,969	Kota Batam	55%	3,594,320,000	

2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	Kota Batam	100%	3,641,459,969	Kota Batam	100%	3,594,320,000	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kota Batam	20 Unit	120,000,000	Kota Batam	20 Unit	120,000,000	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kota Batam	12 Laporan	94,259,969	Kota Batam	12 Laporan	47,120,000	

2.14.04.2 .01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kota Batam	350 Orang	3,427,200,000	Kota Batam	350 Orang	3,427,200,000	
TOTAL					29,748,664,591			26,641,022,622	

BAB IV

PENUTUP

Demikian penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023. Dan diharapkan akan tetap memberikan arah ataupun gambaran sebagai bentuk implementasi dari misi yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan *"Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri"* serta sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk periode berjalan yakni Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ini selayaknya dievaluasi maupun monitor secara berkala sehingga apabila terjadi perubahan dapat dilakukan perbaikan – perbaikan seperlunya, sehingga secara umum dapat selaras dengan visi Kota Batam untuk dapat *"Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"*.

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Batam**



Novi Harmadyastuti, S.Sos

NIP. 19761128 200212 2 006

Tabel 5.2.01 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam
Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (APBD 2023)	APBD 2024			P-RKPD 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU APBD 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU P-RKPD 2023
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				21,417,353,022			18,075,269,123
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	11,712,814,122		100%	10,935,223,223
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	10,753,519,772		100%	10,127,609,873
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	44 Orang	10,753,519,772	Kota Batam	44 Orang	10,127,609,873
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokumen	0.00	Kota Batam	12 Dokumen	0.00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	198,946,550	Kota Batam	100%	153,367,750
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	6,996,000	Kota Batam	3 Paket	6,996,000
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	19,283,050	Kota Batam	4 Paket	21,501,750
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	4,944,000	Kota Batam	1 Paket	4,944,000
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	12,986,000	Kota Batam	4 Paket	8,151,000
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	11,971,000	Kota Batam	2 Paket	7,183,000
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	142,766,500	Kota Batam	12 Laporan	104,592,000
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	68,095,000	Kota Batam	100%	48,783,000

2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	5 Unit	68,095,000	Kota Batam	5 Unit	48,783,000
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kota Batam	100%	519,482,800	Kota Batam	100%	419,032,600
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	37,827,600	Kota Batam	12 Laporan	42,834,600
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	481,655,200	Kota Batam	12 Laporan	376,198,000
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	172,770,000	Kota Batam	100%	186,430,000
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	2 Unit	79,060,000	Kota Batam	2 Unit	86,580,000
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	5 Unit	76,250,000	Kota Batam	5 Unit	83,530,000
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	60 Unit	17,460,000	Kota Batam	60 Unit	16,320,000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	Kota Batam	11,40 / 70%	5,353,485,900	Kota Batam	11,40 / 70%	2,292,036,900
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	Kota Batam	75%	34,859,900	Kota Batam	75%	34,859,900
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	35 Dokumen	34,859,900	Kota Batam	35 Dokumen	34,859,900
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina	Kota Batam	75%	5,318,626,000	Kota Batam	75%	2,257,177,000

2.08.02.2.02.000 1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Dokumen	5,318,626,000	Kota Batam	2 Dokumen	2,257,177,000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Kota Batam	100%	467,509,000	Kota Batam	100%	572,249,000
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Kota Batam	40%	389,944,000	Kota Batam	40%	494,684,000
2.08.03.2.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	57 Dokumen	389,944,000	Kota Batam	57 Dokumen	494,684,000
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	Kota Batam	30%	77,565,000	Kota Batam	30%	77,565,000
2.08.03.2.02.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	17 Layanan	77,565,000	Kota Batam	17 Layanan	77,565,000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Kota Batam	4.75	2,961,751,000	Kota Batam	4.75	3,226,402,000
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	Kota Batam	75%	2,961,751,000	Kota Batam	75%	3,226,402,000
2.08.04.2.01.000 3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Laporan	2,961,751,000	Kota Batam	2 Laporan	3,226,402,000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	Kota Batam	75%	43,958,000	Kota Batam	75%	43,958,000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	Kota Batam	75%	43,958,000	Kota Batam	75%	43,958,000

2.08.05.2.01.000 2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	44 Dokumen	43,958,000	Kota Batam	44 Dokumen	43,958,000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Kota Batam	800	387,400,000	Kota Batam	800	623,145,000
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	Kota Batam	68%	387,400,000	Kota Batam	68%	623,145,000
2.08.06.2.01.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	5 Dokumen	387,400,000	Kota Batam	5 Dokumen	623,145,000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Kota Batam	100%	490,435,000	Kota Batam	100%	382,255,000
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Kota Batam	65%	101,500,000	Kota Batam	65%	101,500,000
2.08.07.2.01.000 4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Batam	40 SDM	101,500,000	Kota Batam	40 SDM	101,500,000
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Kota Batam	65%	319,915,000	Kota Batam	65%	211,735,000
2.08.07.2.02.000 5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Kota Batam	55 Layanan	162,000,000	Kota Batam	55 Layanan	53,820,000
2.08.07.2.02.000 6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kota Batam	55 Layanan	157,915,000	Kota Batam	55 Layanan	157,915,000
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	Kota Batam	30%	69,020,000	Kota Batam	30%	69,020,000

2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kota Batam	40 SDM	69,020,000	Kota Batam	40 SDM	69,020,000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Kota Batam		8,331,311,569	Kota Batam		8,565,753,499
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	Kota Batam	50%	353,200,000	Kota Batam	50%	333,900,000
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	Kota Batam	50%	40,000,000	Kota Batam	50%	20,700,000
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	40,000,000	Kota Batam	1 Dokumen	20,700,000
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	Kota Batam	100%/ 40%	313,200,000	Kota Batam	100%/ 40%	313,200,000
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	Kota Batam	12 Laporan	60,000,000	Kota Batam	12 Laporan	60,000,000
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Batam	1 Laporan	253,200,000	Kota Batam	1 Laporan	253,200,000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	Kota Batam	82.00 / 9	4,336,651,600	Kota Batam	82.00 / 9	4,637,533,499
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	Kota Batam	100% / 45%	1,389,203,600	Kota Batam	100% / 45%	1,389,203,600
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stake Holder dan Mitra kerja	Kota Batam	96 Organisasi	100,000,000	Kota Batam	96 Organisasi	100,000,000

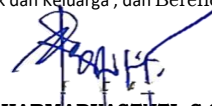
2.14.03.2.01.001 2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	4 Dokumen	190,003,600	Kota Batam	4 Dokumen	190,003,600
2.14.03.2.01.001 3	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Batam	1 Dokumen	100,000,000	Kota Batam	1 Dokumen	100,000,000
2.14.03.2.01.001 1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini Lokakarya (Minilok)	Kota Batam	1 Laporan	180,000,000	Kota Batam	1 Laporan	180,000,000
2.14.03.2.01.001 0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	1 Laporan	739,200,000	Kota Batam	1 Laporan	739,200,000
2.14.03.2.01.000 8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kota Batam	1 Laporan	80,000,000	Kota Batam	1 Laporan	80,000,000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	Kota Batam	70%	192,000,000	Kota Batam	70%	1,544,855,899
2.14.03.2.02.000 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	542 Orang	192,000,000.00	Kota Batam	542 Orang	192,000,000.00
2.14.03.2.02.000 6	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Batam	5 Laporan	0.00	Kota Batam	5 Laporan	1,352,855,899
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB	Kota Batam	83%	2,596,798,000	Kota Batam	83%	1,544,824,000

2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	12 Laporan	161,100,000	Kota Batam	12 Laporan	161,100,000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	600 Orang	1,383,724,000	Kota Batam	600 Orang	1,383,724,000
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	20 Unit	1,051,974,000	Kota Batam	20 Unit	0
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase kampung KB yang aktif	Kota Batam	70%	158,650,000	Kota Batam	70%	158,650,000
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	13 Kampung KB	158,650,000	Kota Batam	13 Kampung KB	158,650,000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	Kota Batam	55%	3,641,459,969	Kota Batam	55%	3,594,320,000
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	Kota Batam	100%	3,641,459,969	Kota Batam	100%	3,594,320,000
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kota Batam	20 Unit	120,000,000	Kota Batam	20 Unit	120,000,000
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kota Batam	12 Laporan	94,259,969	Kota Batam	12 Laporan	47,120,000

2.14.04.2.01.002 4	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kota Batam	350 Orang	3,427,200,000	Kota Batam	350 Orang	3,427,200,000
TOTAL					29,748,664,591			26,641,022,622

Batam, 24 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga, dan Berencana Kota Batam


NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PE
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELI
KOTA BATAM**

Kodefikasi	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan (Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja			
			RENJA MURNI	DPA MURNI	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	28%	52%		
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	25%	50%		
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	39 Orang	39 Orang	44 Orang		
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen		
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	25%	79%		
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1 Paket	2 Paket		
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	2 Paket	4 Paket		

2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	0 Paket	1 Paket		
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	4 Paket	2 Paket		
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1 Paket	3 Paket		
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	11 Laporan	3 Laporan	6 Laporan		

2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	20%	50%		
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	13 Unit	0 Unit	0 Unit		
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	25%	54%		
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	4 Laporan		
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	25%	50%		
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit		
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	34 Unit	0 Unit	0 Unit		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	11,30%	11,30%	7,15%	10.2%		
		Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	65%	65%	64%	65%		

2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	70%	70%	20%	40%		
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	35 Dokumen	4 Dokumen	28 Dokumen		
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina	65%	70%	65%	66%		
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	100%	24%	100%		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	40%	40%	16.6%	62.5%		
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	59 Dokumen	59 Dokumen	33 Dokumen	48 Dokumen		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	30%	30%	16.6%	16.6%		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Layanan	18 Layanan	1 Layanan	9 Layanan		

2.08.03.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	30%	16.6%			
2.08.03.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	0.3	0.166			
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	4,25%	4,50	2.02			
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	65%	70%	17.5%	60%		
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	65%	70%	65.0%	93.54%		
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	65%	70%	64.51%	93.54%		
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	11 Dokumen	22 Dokumen		
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	780 Skor	780 Skor	156 Skor	429 Skor		

2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	66%	66%	20%	36.3%		
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	100%	20%			
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti / yang dilayani)	75%	-	43.8%	50%		
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen		
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	65%	65%	43.8%	50%		
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	59 Layanan	59 Layanan	14 Layanan	30 Layanan		
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	65%	-	43.8%	50%		
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	59 SDM	-	0 SDM	0 SDM		

2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	30%	40%	15%	37%		
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	30%	40%	10%	25%		
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB	100%	100%	25%	50%		
		Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	40%		22%			
2.14.02.2.02.9	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	0	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan		
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	0	1 Laporan	0 Laporan	6 Laporan		
2.14.02.2.02.03	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	81%	81%	20.30%	20.30%		

2.14.03	BERENCANA (KB)	Unmeet Need	9.5		2.40%	2.40%		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/	100%	100%	25%	50%		
		Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	40%		22%	50%		
2.14.03.2.01.1	Advokasi program KKBPK Kepada stakeholders dan mitra kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stake Holder dan Mitra kerja	N/A	96 Organisasi	0 Organisasi	96 organisasi		
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen		
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	-	0 Unit	0 Unit		
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		

2.14.03.2.01.6	Pelaksanaan Mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes), mini lokakarya (Minlok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini Lokakarya (Minilok)	-	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan		
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan		
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 laporan		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	70%	70%	25%	48%		
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana((Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	6 Organisasi	5 Organisasi	0 Organisasi	2 organisasi		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	532 Orang	532 Orang	0 Orang	256 orang		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB	82%	82%	20%	50%		

2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	6 Laporan		
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	575 Orang	575 Orang	803 Orang	1386 orang		
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit	20 Unit	0 Unit	0 unit		
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 laporan		
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase kampung KB yang aktif	70%	70%	18%	40%		
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	13 Kampung KB	13 Kampung KB	2 Kampung KB	6 Kampung KB		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	50%	50%	15%	25%		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	100%	100%	25%	59%		

2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejateraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	N/A	20 Unit	0 Unit	0 unit		
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	1 Laporan		
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	350 Orang	350 Orang	120 Orang	207 orang		
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	350 Kelompok -		0 Kelompok	0 Kelompok		
TOTAL								

IMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
UARGA BERENCANA TAHUN 2023
/

Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran					Sisa Anggaran	KET
RENJA MURNI	APBD 2023 (SIPD)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total Realisasi		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
23,334,047,091	24,884,236,732	4,506,462,682	6,017,334,138			10,523,796,820	14,360,439,912	
13,321,097,291	15,426,713,732	3,989,939,075	4,189,678,662			8,179,617,737	7,247,095,995	
9,262,774,740	10,233,794,432	1,935,225,075	2,902,657,712			4,837,882,787	5,395,911,645	
7,994,697,780	8,652,535,922	1,411,196,293	2,629,017,287			4,040,213,580	4,612,322,342	
7,950,057,780	8,604,645,922	1,396,786,293.00	2,617,857,287.00			4,014,643,580.00	4,590,002,342.00	
44,640,000	47,890,000	14,410,000.00	11,160,000.00			25,570,000.00	22,320,000.00	
259,515,000	627,955,150	361,001,750	53,800,000			414,801,750	213,153,400	
11,960,000	11,960,000	-	9,212,000.00			9,212,000.00	2,748,000.00	
45,000,000	40,294,150	37,191,300.00	-			37,191,300.00	3,102,850.00	

19,997,000	17,538,000	-	5,688,000.00			5,688,000.00	11,850,000.00	
20,384,000	14,254,000	-	5,790,000.00			5,790,000.00	8,464,000.00	
12,195,000	15,944,000	-	3,881,000.00			3,881,000.00	12,063,000.00	
149,979,000	527,965,000	323,810,450.00	29,229,000.00			353,039,450.00	174,925,550.00	

186,489,000	99,558,000	0	0			0	99,558,000	
186,489,000	99,558,000	-	-			-	99,558,000.00	
647,442,960	676,755,360	143,527,032	184,940,425			328,467,457	348,287,903	
80,420,400	109,732,800	13,294,560.00	13,857,953.00			27,152,513.00	82,580,287.00	
567,022,560	567,022,560	130,232,472.00	171,082,472.00			301,314,944.00	265,707,616.00	
174,630,000	176,990,000	19,500,000	34,900,000			54,400,000	122,590,000	
79,060,000	79,060,000	10,500,000.00	19,900,000.00			30,400,000.00	48,660,000.00	
75,350,000	75,350,000	9,000,000.00	15,000,000.00			24,000,000.00	51,350,000.00	
20,220,000	22,580,000	-	-			-	22,580,000.00	
70,000,000	34,860,000	0	26,962,500			26,962,500	7,897,500	
1,147,655,000	1,373,905,000	854,243,000	21,007,000			875,250,000	498,655,000	

70,000,000	34,860,000	0	26,962,500			26,962,500	7,897,500	
70,000,000	34,860,000	-	26,962,500.00			26,962,500.00	7,897,500.00	
1,147,655,000	1,373,905,000	854,243,000	21,007,000			875,250,000	498,655,000	
1,147,655,000	1,373,905,000.00	854,243,000.00	21,007,000.00			875,250,000.00	498,655,000.00	
410,980,101	356,064,000	40,940,000	110,929,000			151,869,000	204,195,000	
310,000,100	255,040,000	40,500,000	91,928,000			132,428,000	122,612,000	
310,000,100	255,040,000	40,500,000.00	91,928,000.00			132,428,000.00	122,612,000.00	
100,980,001	101,024,000	440,000	19,001,000			19,441,000	81,583,000	
100,980,001	101,024,000	440,000.00	19,001,000.00			19,441,000.00	81,583,000.00	

N/A	-	-	-			-	-	
N/A	-	-	-			-	-	
1,584,598,750	2,653,488,500	1,048,188,000	844,115,000			1,892,303,000	761,185,500	
1,584,598,750	2,653,488,500	1,048,188,000	844,115,000			1,892,303,000	761,185,500	
1,584,598,750	2,653,488,500	1,048,188,000.00	844,115,000.00			1,892,303,000.00	761,185,500.00	
74,994,500	67,242,000	43,505,000	16,000,000			59,505,000	7,737,000	
74,994,500	67,242,000	43,505,000	16,000,000			59,505,000	7,737,000	
74,994,500	67,242,000	43,505,000.00	16,000,000.00			59,505,000.00	7,737,000.00	
420,000,000	596,399,800	67,838,000	237,275,450			305,113,450	291,286,350	

420,000,000	596,399,800	67,838,000	237,275,450			305,113,450	291,286,350	
420,000,000	596,399,800	67,838,000.00	237,275,450.00			305,113,450.00	291,286,350.00	
350,094,200	110,960,000	0	30,732,000			30,732,000	80,228,000	
112,949,600	0	0	0			0	0	
112,949,600	0	-	-			-	-	
161,064,000	110,960,000	0	30,732,000			30,732,000	80,228,000	
161,064,000	110,960,000	-	30,732,000.00			30,732,000.00	80,228,000.00	
76,080,600	0	0	0			0	0	
76,080,600	0	-	-			-	-	

10,012,949,800	9,457,523,000	516,523,607	1,827,655,476			2,344,179,083	7,113,343,917	
187,600,000	325,800,000	45,102,000	82,249,868			127,351,868	198,448,132	
70,000,000	60,000,000	0	0			0	60,000,000	
70,000,000	60,000,000					-	60,000,000.00	
117,600,000	265,800,000	45,102,000	82,249,868			127,351,868	138,448,132	
	0	0	0			0	0	
-	64,200,000	10,302,000.00	23,287,100.00			33,589,100.00	30,610,900.00	
-	129,600,000	22,800,000.00	42,000,000.00			64,800,000.00	64,800,000.00	
117,600,000	72,000,000	12,000,000.00	16,962,768.00			28,962,768.00	43,037,232.00	
4,115,904,800	5,241,923,000	353,611,607	713,445,608			1,067,057,215	4,174,865,785	

4,443,504,000								
838,455,000	844,600,000	53,526,607	196,884,608			250,411,215	594,188,785	
-	80,000,000	-	39,524,000.00			39,524,000.00	40,476,000.00	
108,000,000	60,000,000	13,450,000.00	19,200,000.00			32,650,000.00	27,350,000.00	
-	0	-	-			-	-	
-	150,000,000	-	-			-	150,000,000.00	

-	156,000,000	15,427,000.00	46,281,000.00			61,708,000.00	94,292,000.00	
486,000,000	318,600,000	24,649,607.00	91,879,608.00			116,529,215.00	202,070,785.00	
244,455,000	80,000,000	-	-			-	80,000,000.00	
452,173,900	240,000,000	0	96,000,000			96,000,000	144,000,000	
44,999,900	112,000,000	-	44,800,000.00			44,800,000.00	67,200,000.00	
407,174,000	128,000,000		51,200,000.00			51,200,000.00	76,800,000.00	
2,931,025,900	3,946,823,000	300,085,000	356,425,000			656,510,000	3,290,313,000	

-	140,400,000	26,010,000.00	36,500,000.00			62,510,000.00	77,890,000.00	
1,832,485,900	2,779,703,000	274,075,000.00	303,425,000.00			577,500,000.00	2,202,203,000.00	
974,490,000	957,420,000	-	-			-	957,420,000.00	
124,050,000	69,300,000	-	16,500,000.00			16,500,000.00	52,800,000.00	
224,250,000	210,500,000	0	64,136,000			64,136,000	146,364,000	
224,250,000	210,500,000	-	64,136,000.00			64,136,000.00	146,364,000.00	
5,379,445,000	3,889,800,000	117,810,000	1,031,960,000			1,149,770,000	2,740,030,000	
5,379,445,000	3,889,800,000	117,810,000	1,031,960,000			1,149,770,000	2,740,030,000	

-	360,000,000	-	-			-	360,000,000.00	
150,025,000	102,600,000	-	8,990,000.00			8,990,000.00	93,610,000.00	
5,229,420,000	3,427,200,000	117,810,000.00	1,022,970,000.00			1,140,780,000.00	2,286,420,000.00	
-	0	-	-			-	-	
23,334,047,091	24,884,236,732	4,506,462,682	6,017,334,138			10,523,796,820	14,360,439,912	

E.7.5. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

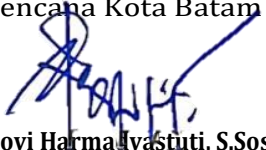
1. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.70, sebagai berikut:

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja DP3AP2KB
KOTA BATAM

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.√	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Batam, 25 Juli 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Batam


Novi Harmalyastuti, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006

Petunjuk Pengisian Formulir E.70:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaporkan hasil rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KOTA BATAM

Jalan Raja Isa No.17 Gedung Bersama Lt.III Batam Center; Telp/Fax. (0778) 470692 Batam
Email: bppakbbatam@gmail.com

Kode Pos: 29464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor: 258/RP.01.01/VI/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
BATAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2016-2021, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD untuk periode 1 (satu) tahun menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan Program Kegiatan Tahun 2024;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);

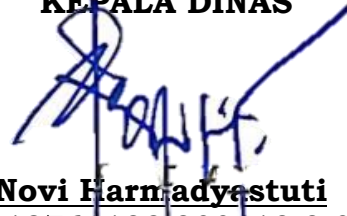
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 28 Juni 2024

KEPALA DINAS



Novi Harnadyestuti

NIP. 19761128200212 2 006

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DP3APPKB
KOTA BATAM
TAHUN 2023**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
TAHUN 2023**

NO	JABATAN			JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM			PENGARAH
2	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM			PENANGGUNGJAWAB
3	KASUBBAG. PERENCANAAN PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM			SEKRETARIS
I.	PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	NURHASANAH, SE	19800830 201001 1 003	Kabid. PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinator
2	FERA DARMAANTI, S.IP	19870211 201101 2 004	Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
3	NURUL YUNI, S.H	19740626 200212 2 005	Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
II.	PEMENUHAN HAK ANAK			

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	SRI YANTI, S.E, M.Si	19750210 200003 2 006	Kabid. Pemenuhan Hak Anak	Koordinator
3	SRI RAHMI FITRIANTY, S.E	19691210 200212 2 008	Kasi PHA di Bidang Pengasuhan, Alternatif Pendidikan dan Budaya	Anggota
3	ULFI RAMAYANTI, S.ST	19680611 198801 2 003	Kasi PHA di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Anggota
III.	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	FISCA ANGGIANA, S.E	19710714 200003 2 007	Kabid. Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan	Koordinator
2	DEDY SURYADI, AKS, M.H	19670929 198803 1 009	Kasi Pencegahan & Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	Anggota
3	HASRIATI, S.E	19741027 200901 2 004	Kasi Data, Informasi, Perempuan dan Anak	Anggota
IV.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MUTIARA AYU, S.IP	19870814 200701 2 002	Kabid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator

2	Ir. INDAWATY WAKIDJO	19671102 199403 2 005	Kasi Advokasi, Informasi, Edukasi dan Pengendalian Penduduk	Anggota
3	LIBERTY LUCI PATIMANG, S.KM	19711216 199803 2 008	Kasi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
IV.	KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	dr. DEWI MURNI	19751225 200604 2 029	Kabid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Koordinator
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	TEDDY SUHANDI, S.IP	19810610 200801 1 011	Kepala UPTD PPA	Koordinator
2	ROLIANA SIBURIAN, AMAK	19790320 200604 2 013	Kasubag. Tata Usaha UPTD	Anggota

Batam, 28 Juni 2024
KEPALA DINAS

Novi Harahadyastuti
NIP. 19761128 200212 2 006